

ABSTRAK

Konflik agraria di Kampung Laut, Cilacap disebabkan klaim lahan oleh Lembaga Perumahan (Lapas) Nusakambangan terhadap tanah timbul hasil sedimentasi yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun. Konflik ini bukan semata sengketa lahan, melainkan persoalan struktural yang melibatkan ketimpangan akses antara masyarakat dengan institusi negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik komunikasi advokasi masyarakat Kampung Laut dalam menghadapi konflik agraria menggunakan teori Komunikasi Advokasi Lawrence Wallack. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini melibatkan empat informan yang dipilih secara *purposive*, yakni pemerintah desa, tokoh masyarakat, pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, dan masyarakat terdampak. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat memahami konflik sebagai persoalan kebijakan dan struktur kekuasaan, bukan kesalahan individual. Komunikasi advokasi dibangun melalui pendidikan hukum kritis, pengorganisasian warga dalam Barisan Petani dan Nelayan Kampung Laut (BATA LAUT), serta aliansi dengan organisasi masyarakat sipil. Strategi komunikasi dilakukan melalui jalur formal berupa aksi demonstrasi, audiensi ke lembaga pemerintah, dan pemanfaatan media massa, serta jalur informal seperti musyawarah warga dan penggunaan media sosial. Praktik komunikasi advokasi berfungsi membangun kesadaran publik, legitimasi sosial, dan tekanan terhadap pembuat kebijakan. Meskipun telah menghasilkan respons simbolik dari pemerintah, realisasi kebijakan konkret masih terhambat oleh struktur kekuasaan yang ada.

Kata kunci: komunikasi advokasi, konflik agraria, Kampung Laut, ketimpangan akses, kebijakan publik

ABSTRACT

The agrarian conflict in Kampung Laut, Cilacap involves land claims by Nusakambangan Correctional Facility (Lapas) over sediment-formed land that has been managed by the community for generations. This conflict is not merely a land dispute but a structural issue involving power imbalances between the community and state institutions. This study aims to analyze the advocacy communication practices of the Kampung Laut community in addressing agrarian conflict using Lawrence Wallack's advocacy communication theory. This qualitative case study involves four purposively selected informants: village government officials, community leaders, legal aid workers from Yogyakarta Legal Aid Institute (LBH), and affected residents. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using Miles and Huberman's interactive model. Findings indicate that the community understands the conflict as a policy and power structure issue rather than individual error. Advocacy communication was built through critical legal education, community organizing within the Kampung Laut Farmers and Fishermen Alliance (BATA LAUT), and alliances with civil society organizations. Communication strategies employed both formal channels including demonstrations, government audiensi, and mass media engagement, as well as informal channels such as community deliberations and social media use. Advocacy communication practices function to build public awareness, social legitimacy, and pressure on policymakers. While symbolic government responses have been achieved, concrete policy realization remains hindered by existing power structures.

Keywords: advocacy communication, agrarian conflict, Kampung Laut, power imbalance, public policy